

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Bernadette Waluyo, *Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).
- Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia, dalam Rangkaian Lokakarya Terbatas, Pusat Pengkajian Hukum*, (Jakarta: Cipta Grafika, 2005).
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009).
- Herowati Poesoko, M. hadi Subhan, Ivida Dewi Suci, *Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: Laksbang Yustitia, 2023).
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam mengeksekusi Benda Jaminan debitor Pailit*, (Yogyakarta: Lakesbang PRESS-indo, 2009).
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan terjemahan John Rawls*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2012).
- Mahfud MD, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013).

- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006).
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008).
- _____, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- M. Singarimbun dan S. Efendi, *Metode Penelitian Survey Kuantitatif*, (Jakarta: Pustaka LP3E, 1989).
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2014).
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
- _____, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
- Philipus M Hadjon, *Pengantar hukum administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2008).
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007).
- Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001).
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Semarang: Genta Publishing, 2013).
- Sjahdeini Sutan Remy, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983).
- Sutan Remy Sjahdeni, *Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010).

_____, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Syamsudin M.Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000).

Thoga Hutagalung, *Peranan Hukum dan Keadilan dalam Pembangunan Masyarakat yang Sejahtera*, (Bandung: Armico, 1990).

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014).

Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Keputusan Ketua MA Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841).

JURNAL

Anita Afriana dan Rai Mantili, “*Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Hukum De’jure, Vol. 2, No.2, September 2017.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), 2005.

WEBSITE

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Perseroan terbatas,
<https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>, diakses pada 13 Januari
2024

